PELACURAN DAN STRATEGI DAKWAH

Lina Nur Anisa

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Ngawi

Abstract

Prostitution is a classic social problem that continues to exist, and seems difficult to eradicate. This makes the topic of prostitution interesting to be discussed, and requires a lot of attention from all parties to get a "way out" which is more solution for all the problems that arise. There are various kinds of motives and driving factors, so women become prostitutes. All of this is basically a sign of anxiety and confusion of the generation. The question is who is responsible for all this? Is there a right solution to overcome this problem? What about the role of religionists? What can the preachers do?

Keywords: Prostitution, Islamic da'wah (preaching), da'wah (preaching) strategy

Abstrak

Pelacuran merupakan masalah sosial klasik yang terus menerus ada, dan seakan sulit untuk diberantas. Hal ini menjadikan topik tentang pelacuran menjadi menarik untuk dibahas, dan memerlukan banyak perhatian dari semua pihak guna mendapatkan "way out" yang lebih solutif atas segala permasalahan yang muncul. Terdapat berbagai macam motif dan faktor pendorong, sehingga perempuan menjadi seorang pelacur. Semua ini pada dasarnya sebagai pertanda kegelisahan dan kebingungan generasi. Pertanyaannya adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap semua ini? Adakah solusi yang tepat untuk mengatasi problematika ini? Bagaimana dengan peran agamawan? Apa yang bisa dilakukan oleh para pendakwah?

Kata Kunci: Pelacuran, dakwah Islamiah, strategi dakwah

A. PENDAHULUAN

Pelacuran atau biasa disebut prostitusi berasal dari bahasa Latin, penggabungan dari dua kata, yaitu *pro-stituere/pro-stauree* yang artinya membiarkan diri melakukan persundalan, perzinaan, pergundaan, atau penyerahan diri secara badaniah. Berkenaan dengan hal ini, "prostitusi adalah penyerahan diri secara badaniah seorang wanita untuk pemuasan laki-laki siapapun yang menginginkannya dengan pembayaran."¹

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat dijelaskan bahwa prostitusi memiliki tiga unsur, yakni: pertama. Penyerahan diri seorang wanita, kepada laki-laki siapapun, tanpa pandang bulu yang menginginkan jasanya. Kedua, laki-laki yang berhubungan dengan wanita yang menyerahkan dirinya, kemudian dibayar dengan sejumlah uang ataupun fasilitas. Pembayaran disini dimaksudkan untuk mengganti upah Pekerja Seks Komersial (PSK). Ketiga, melacur dalam hal ini adalah pekerjaan tetapnya atau pekerjaan sampingan. Sebutan-sebutan *sundal, bondon, kimcil, jalang, balon, lonte, telembuk, pereks atau perempuan eksperimen, jaggol, pecun, serta kupu-kupu malam*, merupakan sebagian istilah yang diartikan sebagai

¹ Kartono, Patologi Sosial, 2009, Jakarta: Rajawali, hal 207

sebutan untuk PSK, istilah ini masih sering digunakan di beberapa daerah di Indonesia. Contohnya istilah *lonte dan kimcil* sering dipakai di daerah Dukuhseti.²

Prostitusi atau praktik pelacuran merupakan profesi yang usianya sama tuanya dengan peradaban manusia. Banyak kalangan berpendapat, bahwa prostitusi ada semenjak manusia ada dan terus berkembang sampai saat ini. Bahkan tidak sedikit yang berpendapat, bahwa pelacuran berkembang karena laki-laki berani membayar. Dengan kata lain, prostitusi berkembang karena terciptanya mekanisme pasar yang menjadikan pelacuran sebagai suatu bisnis seks yang sangat menguntungkan.³ Bentuk dan mekanisme bisnis seks yang ditawarkan industri seks tersebut sangat beragam. Adapun kemunculan lokalisasi-lokalisasi prostitusi tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua bagian; pertama: industri seks yang terorganisir, seperti panti pijat, rumah bordil, klub malam, diskotik, dan sebagainya. Kedua, industri seks yang tidak terorganisir yang dapat ditemukan pada beberapa kelompok wanita panggilan (penampungan) maupun wanita yang menjajakan diri di jalanan dari pasaran kelas menengah sampai kelas bawah.⁴

Perbincangan tentang prostitusi dapat dijumpai di beberapa media massa, baik koran, majalah, dan televisi yang memberikan gambaran nyata tentang kehidupan masyarakat, khususnya tentang pelacuran atau prostitusi dengan segala permasalahannya. Berbagai tindakan dan langkah strategis telah diambil pemerintah dalam menangani masalah ini, baik dengan melakukan langkah persuasif melalui lembaga-lembaga sosial sampai menggunakan tindakan represif berupa penindakan bagi mereka yang bergelut di bidang pelacuran. Tetapi kenyataan yang dihadapi adalah pelacuran tidak dapat dihilangkan, melainkan memiliki kecenderungan untuk semakin meningkat dari waktu ke waktu. Permasalahan tersebut akan lebih menjadi rumit lagi tatkala pelacuran dianggap sebagai komoditas ekonomi (walaupun dilarang UU), yang dapat mendatangkan keuntungan finansial, yang sangat menggiurkan bagi para pebisnisnya. Pelacuran telah diubah dan berubah menjadi bagian dari bisnis yang dikembangkan terus menerus sebagai komoditas ekonomi yang paling menguntungkan, mengingat pelacuran merupakan komoditas yang tidak akan habis terpakai. Oleh sebab itu, fenomena prostitusi saat ini telah menjadi fenomena sosial yang menjadi faktor pendukung maraknya hiburan dan kesenangan yang ditawarkan di beberapa kota di Indonesia, termasuk di Kota Surabaya. Bahkan secara impisit oleh para pemburu kesenangan telah dijadikan salah satu *sex tourism*, karena mengingat prostitusi yang semakin waktu tidak pernah terlihat surut.⁵

Jumlah pelacur di Indonesia mengalami peningkatan. Hal ini menjadi masalah yang serius mengingat fakta adanya kaitan erat antara pelacur dengan penggunaan NAZA dan penularan AIDS/HIV. Berbagai pihak, baik melalui swadaya masyarakat maupun yang diusahakan pemerintah, berusaha

²Nurviyati, Skripsi Strategi Dakwah tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menanggulangi dampak prostitusi (Studi Kasus di Dukuh Selempung Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti kabupaten Pati), 2015, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang. Hal 1-2

³Sulistyaningsih, Endang & Yudo Swasono, 1993, *The Sex Industry, Prostitution and Development in Indonesia*, Laporan penelitian untuk Universitas Mahidol, Bangkok. Hal 3

⁴Sutarto Hadi&Bambang Wicaksono, Triantoro, 2001, *Pembinaan Wanita Pekerja Seks Komersial Pasca Penutupan Lokalisasi*, PPPK UGM, Yogyakarta. Hal 281

⁵A. Sunarto AS, *Kyai dan Prostitusi Pendekatan Dakwah KH. Muhammad Khoiron Syuaeb di Lokalisasi Kota Surabaya*, Jurnal Komunikasi Islam, Volume 03, Nomor 2, Desember 2013

menanggulangi masalah pelacuran ini. Secara formal pemerintah mempunyai dua macam cara penanganan, yakni sistem resosialisasi yang dikelola oleh Dinas Sosial di bawah Departemen Dalam Negeri, dan sistem panti yang dikelola oleh Departemen Sosial. Hal ini justru menunjukkan ketidakpaduan pemerintah dalam menanggulangi masalah pelacuran di Indonesia. Melalui artikel ini akan dievaluasi keberadaan resosialisasi dalam menanggulangi masalah pelacuran di Indonesia.⁶

Membahas masalah seksualitas manusia ternyata tidak sesederhana yang dibayangkan atau dipahami masyarakat kebanyakan. Sesungguhnya seksualitas merupakan pokok bahasan yang menyentuh begitu banyak aspek kehidupan manusia, sehingga hampir tidak mungkin untuk menyediakan sebuah pemahaman yang lengkap mengenai seksualitas. Seks ternyata hanyalah salah satu jenis penyakit berbahaya yang merongrong kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat. Apakah ini sebuah pertanda terjadinya krisis moralitas didalam masyarakat kita? Banyak perspektif yang harus dilihat dalam menjawab pertanyaan menggugah semacam itu.

Seks dalam budaya timur, diantaranya Indonesia, dikategorikan ke dalam hal yang tabu untuk dibicarakan, baik antar pribadi maupun secara umum. Walaupun perkembangan yang terjadi sekarang sudah jauh dari pakem budaya timur tersebut. Seks dijadikan komoditi dalam arti yang sebenarnya. Produk-produk yang merangsang naluri dasar manusia untuk tetap dalam posisi “on”, selalu laris manis di pasaran. Artinya, kebutuhan untuk membicarakan masalah hubungan seksual dan hal-hal lain seputar hal tersebut, sebenarnya sudah berkembang dan masyarakat sudah berani untuk mengekspresikan secara lebih terbuka. Seks merupakan kebutuhan primer manusia sekaligus sebagai anugerah Tuhan kepada manusia. Intinya, manusia ada karena seks ada. Dengan kata lain, disebabkan karena seks ada maka manusia ada. Seks menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Namun setiap manusia harus berhati-hati terhadap seks, karena seks ibarat kuda yang jika tidak dikendalikan akan berlari tanpa arah dan tujuan.⁷

Perempuan dianggap sebagai makhluk yang memiliki banyak kelemahan, baik dari segi fisik, intelektual, maupun kapasitas spiritual. Bahkan, perempuan dianggap sebagai sumber dosa, penggoda, yang seksualitasnya siap menjerumuskan laki-laki, karena itu dia harus disembunyikan di balik hijab {cadar}, sebagai upaya penjagaan, pembatasan, dan pengungkungan perempuan dari kehendak seksualitasnya yang membahayakan laki-laki. Mernissi mengungkapkan bahwa pemakaian cadar bukanlah satu-satunya cara untuk menekan insting seksual, karena memakai cadar atau tidak bagi perempuan, tidak menjamin pada kuat atau lemahnya kemampuan menguasai dorongan seksual, sehingga tidak secara otomatis perempuan yang bercadar lebih mampu menguasai dorongan seksualnya dari pada perempuan yang tidak memakai cadar. Dalam hal ini patut kita bertanya, sebetulnya siapakah yang diuntungkan; laki-laki atau perempuankah?⁸

⁶Koentjoro, *Pelacur dan Resosialisasi Antara Patologi dan Rehabilitasi Sosial*, <https://doi.org/10.23917/indigenous.v0i0.4600>. Diakses tanggal 5 Januari 2019

⁷Abu Al Ghifary, *Gelombang Kejahatan Seks Remaja Modern* (Bandung: Mujahid Press, 2004), Hal 5

⁸Nurhilaliati, “Seksualitas dan Pencadaran Wanita”, dalam *Tasamuh, Jurnal Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Islam*, Fakultas Dakwah IAIN Mataram (Volume 2 Nomer 2, Juni 2005) 279

Walaupun kedua jenis kelamin terus saling menyalahkan, bahwa lawan jenisnyalah penyebab kesusahan bagi jenis lain. Namun, jenis yang satu tidak bisa hidup tanpa jenis yang lain, dan jenis yang satu tetap menarik bagi jenis yang lain. Dorongan seksual merupakan kecenderungan biologis untuk mencari tanggapan seksual dari seorang lain atau lebih biasanya dari jenis yang berbeda.⁹

Salah satu ciri masyarakat modern dan masyarakat industri adalah adanya ketidakpastian fundamental dalam bidang nilai, moral dan etika kehidupan. Dalam kenyataannya, proses modernisasi dan industrialisasi yang tidak dilandasi agama telah membawa harga diri dan martabat manusia menurun bahkan tidak lebih sekedar dehumanisasi yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Salah satu cirinya adalah hubungan seks diluar nikah atau perzinahan dianggap sebagai bagian penting dari hak asasi manusia {HAM}, sepanjang tidak memperkosa dan menggauli anak dibawah umur.

Menurut Barry, pelacuran bisa dikatakan sejenis perbudakan seks atas kaum perempuan. Pelacuran juga dipandang merendahkan derajat, harga diri, serta martabat manusia khususnya kaum perempuan.¹⁰ Dalam tinjauan ideologi ataupun ekonomi, terdapat kecenderungan mengutuk bahwa pelacuran sebagai penindasan seksualitas dan adanya pandangan yang melihat sebagai eksploitasi ekonomi. Dalam penindasan seksual, hubungan kekuasaan terjadi antara laki-laki yang perlu menunjukkan kekuasaannya yakni maskulinitasnya, dengan perempuan yang tidak mempunyai kekuasaan dan terjerat dalam femininitasnya. Dalam eksploitasi ekonomi, hubungan kekuasaan terjadi antara pemilik modal dan mereka yang terasingkan dari sumber daya ekonomi.¹¹ Tak dapat dibantah bahwa niscaya laki-lakilah yang dianggap mempunyai dorongan seksual yang besar, namun pengaturan atas seksualitas manusia baik yang bersifat larangan ataupun yang bersifat legalisasi selalu ditujukan pada perempuan.

Salah satu dampak kasat dari “Triple T”¹² {Transportasi, Telekomunikasi, dan Turisme} adalah maraknya bisnis pelacuran. De Sousa melalui hasil risetnya menunjukkan bahwa ada hubungan yang erat antara perpindahan penduduk {migrasi dan turisme} dengan peningkatan jumlah pelacuran di negara dunia ketiga di Asia. Karena sangat dimungkinkan dengan pelacuran bukan hanya memberi lapangan pekerjaan bagi wanita-wanita muda, namun juga dapat memberikan pemenuhan kepemilikan materi {kekayaan} yang menjadi aspirasi material perempuan dan pihak-pihak lain yang terkait.¹³ Lalu muncul pertanyaan: apa yang mendorong {memotivasi] perempuan untuk melacurkan diri, apakah ada faktor budaya, lingkungan, atau faktor lain yang sangat mempengaruhi mereka? Dan kenapa hanya pihak perempuan yang mendapatkan stigmatisasi dari masyarakat bahwa pelacur adalah orang atau hal yang kotor, maksiat, asusila, dan lain sebagainya.

⁹ Paul B. Horton, *Sosiologi Jilid I* (Jakarta: Erlangga, 1996) hal 148

¹⁰ Koentjoro, On the Spot, *Tutur dari sarang pelacur* (Yogyakarta: Tinta, 2004), hal 6

¹¹ Ratna Saptari, “Sebuah Pengantar”, dalam Thanh Dam Truong, Seks, Uang, dan Kekuasaan (Jakarta: LP3ES, 1992), xxi

¹² Kuntjoro Jakti, *Globalisasi Ekonomi Dunia dan Dampaknya terhadap Pembangunan Infrastruktur di Indonesia* (Jakarta: Bukaka, 1996)

¹³ Koentjoro, On the..., hal 7

B. SEJARAH PELACURAN DI INDONESIA

Pelacuran di Indonesia tidak terlepas dari sejarah peradaban bangsa, dimana bangsa kita dikenal dengan berbagai macam kerajaan. Perdagangan perempuan saat itu menjadi pelengkap dari sistem feodal {kerajaan}. Kekuasaan raja pada saat itu tidak terbatas hanya sekedar menguasai pemerintahan, tetapi juga menguasai segalanya. Semua orang harus patuh pada raja, tidak boleh ada orang yang membangkang. Raja berkuasa penuh hingga bisa mendapatkan perempuan sebanyak mungkin, yang pada saat itu disebut “selir”. Uniknya, semua rakyat akan bangga jika ada anggota keluarganya dijadikan selir bahkan ada yang menawarkan anaknya untuk dijadikan sebagai selir. Pemberian selir dari kerajaan-kerajaan kecil bisa melambangkan sebagai hadiah, sebagai lambang kesetiaan atau persahabatan.¹⁴ Pelacuran telah terjadi sejak zaman kerajaan Majapahit. Salah satu bukti yang menunjukkan hal ini adalah penuturan kisah-kisah perselingkuhan dalam kitab Mahabharata. Pada zaman zaman kerajaan Mataram, pelacuran malah semakin meningkat. Label “daerah pelesiran” yang disandang pada daerah Wonogiri dan Wonosari dapat dijadikan sebagai bukti.

Pelacuran di Indonesia semakin berkembang pada masa penjajahan. Ingleson (1986) menyebutkan bahwa pelacuran meningkat dengan cepat pada abad ke 19-M sebagai buah dari meningkatnya permintaan pelayanan seks. Pada tahun 1900-an, penyakit menular merembet dengan cepat. Menurut Jones, pada tahun 1913 peraturan baru diterapkan pada mucikari dan agen-agen. Dan saat itu diperkirakan jumlah pelacur berjumlah sekitar 3000 sampai dengan 4000 orang.¹⁵ Pada tahun 1804-1820, sejak dibuatnya jalan Deandles dari Anyer-Penarukan yang diikuti pembangunan rel kereta api, perkembangan pelacuran semakin tumbuh subur. Nasib wanita pada masa penjajahan, tidak jauh berbeda dengan sistem yang berlaku pada masa kerajaan, bahkan kaum perempuan lebih menderita dengan adanya pemaksaan dari kaum penjajah dengan mengambil wanita tertentu yang memiliki paras cantik untuk memenuhi hasrat nafsu tentara penjajah {mereka disebut ianphu-pada masa penjajahan Jepang}.

Akibatnya di kamp-kamp atau kompleks militer penjajah selalu ditemukan lokasi pelacuran. Dan pada saat hampir berakhirnya masa penjajahan Jepang di Indonesia, telah menjamur rumah-rumah bordil di setiap daerah di seluruh Indonesia, terutama di setiap stasiun kereta api selalu ada pelacuran, karena kereta api menjadi satu-satunya alat transportasi yang menghubungkan kota yang satu dengan kota yang lain dan stasiun menjadi tempat transit. Mulai dari Jakarta hingga Bandung, terdapat lokalisasi Kebon jeruk, Kebon Tangkil, Sukamanah, dan Saritem. Sedangkan di Surabaya ada lokalisasi Kremil, Tandes, dan Bangunsari, dimana lokalisasi tersebut berada di sekitar stasiun kereta api.¹⁶

Pada tahun 1970, pemerintah Indonesia banyak membangun galangan kilang {penyulingan} minyak. Proyek tersebut menyebabkan meningkatnya permintaan akan pelacur, baik secara langsung maupun tidak. Dan pada tahun 1990, mulai merebak tempat-tempat hiburan malam seperti karaoke, diskotik, dan

¹⁴ Abu Al Ghifary, Gelombang..., hal 100

¹⁵ Koentjoro, On the..., hal 22

¹⁶ Al Ghifary, Gelombang..., hal 101

penginapan-penginapan yang banyak mendukung {memicu} peningkatan pelacuran.¹⁷

C. PELACURAN DALAM PERSPEKTIF TEORI SOSIAL

Persepsi terhadap pelacuran berhubungan erat dengan pandangan budaya seksual. Perilaku seksual dan seksualitas sangat menarik perhatian mereka yang menggeluti seksologi, pekerja sosial, dan para pengkaji pelacuran. Terdapat tiga perspektif utama tentang pelacuran dan seksualitas manusia¹⁸ yaitu; *pertama*, perspektif kaum feminis. Carpenter {1994} memandang pelacuran sebagai hasil dari tekanan masyarakat patriarkal dan kapitalis. Pandangan ini menekankan ketidakseimbangan dan perbedaan seks sebagai alasan kuat mengapa seorang wanita menjadi pelacur. Pelacur kerap kali menghadapi konsekuensi dan dicap sebagai pelaku tindak kriminal, penyakit masyarakat, dan lain sebagainya. Sementara itu, pelanggan pelacur tidak mengalami hal yang demikian.

Kedua, perspektif dari Rubin. Wrightmann {1988} menggolongkan seksualitas manusia menjadi enam pandangan, yaitu; *pertama*, asketisme tradisional, melihat hubungan seks dari sisi nilai guna sebagai kegiatan prokreasi dan hanya diizinkan untuk dilakukan didalam lembaga pernikahan; *kedua*, asketisme yang tercerahkan {enlightened acticitism} memandang hubungan seks perlu dikontrol dan dimonitor secara hati-hati. Aktivitas seksual dipandang tidak sebagai kejahatan, dan terus mendorong untuk mengekspresikan kebutuhan seksual selama sesuai dengan kondisi tertentu dan penuh dengan kehati-hatian; *ketiga*, liberalisme humanistik atau posisi relativistik. Memandang aktivitas seksual dapat dilakukan selama didasari oleh kesepakatan diantara dua orang yang terlibat didalamnya, termasuk merngesahkan semua tipe aktivitas seksual; *keempat*, humanisme radikal. Pandangan ini mempertimbangkan semua tipe aktivitas seksual sebagai hal yang dapat diterima. Tidak ada penolakan terhadap semua aktivitas seksual sepanjang tidak melukai secara fisik maupun emosional kedua belah pihak; *kelima*, fun morality, berhubungan seks dipandang sebagai jalan untuk bersenang-senang, tidak boleh dibatasi intensitasnya, frekwensinya atau tipenya sepanjang tidak terjadi kekerasan fisik; *keenam*, anarki seksual atau seks bebas. Posisi ekstrem yang tidak membatasi tipe seksual. Bebas sebebasnya dalam hal dimana, kapan dan dengan siapa ataupun dengan apa.

Ketiga, perspektif dari Thanh-Dam Truong mengajukan empat pendekatan pemikiran seksualitas¹⁹ yaitu; pertama, pemikiran yang dibentuk oleh tradisi empiris, yang berangkat dari anggapan bahwa seks merupakan kebutuhan atau dorongan biologis. Dalam tradisi ini terdapat dua posisi yang berbeda, yaitu pandangan biososial yaitu pola perilaku seksual merupakan sesuatu yang alamiah yang muncul dari dorongan seksual, dan dorongan seksual laki-laki lebih kuat dan lebih ekspresif dibanding perempuan. Dan pandangan sosio kultural, madzhab pemikiran ini menganggap seks bebas, poligami, pelacuran, dan perkosaan adalah produk dari interaksi antara dorongan seks dengan sistem sosio kultural yang lebih spesifik, sementara seks bebas dan perkosaan adalah pilihan perilaku sosial. Kedua, Pendekatan konstruksi sosial gender, memandang seksualitas sebagai ekspresi

¹⁷Koetjoro, On the..., hal 63

¹⁸

¹⁹Truong, Seks..., hal 5-8

makna kultural dan simbol dalam lingkup seks biologis dan praktik seksual. Pendekatan ini berpihak pada perempuan dimana seksualitas dipandang sebagai ekspresi dari kekuatan sosial lelaki. Seks bebas dan kekerasan seksual adalah ciptaan laki-laki. Dan ketiga, Pendekatan historis ideologis, pendekatan ini dibangun dari teori Engels yang mengadopsi pendekatan historis untuk menunjuk hubungan seksual, yang menekankan pada tiga aspek, yaitu: {a} faktor ekonomi, transformasi ideologi dan kontrol seksualitas perempuan, dimana hubungan ekonomi berperan dalam membentuk norma seksual. {b} Faktor transformasi ideologi dan perannya dalam menjalankan sistem ekonomi tertentu, fenomena kudangan {wishes} dan pelacuran merupakan model sosialisasi yang menjelaskan transformasi ideologi. {c} pendekatan yang menekankan kontrol seksualitas perempuan, dan {d} pendekatan historis antiesensialis, yaitu pandangan yang mengusung perdebatan tentang hubungan laki-laki dengan perempuan, seksualitas didefinisikan sebagai sesuatu yang konstan, baik dalam pengertian biologis maupun ideologis.²⁰

D. Motif dan Faktor Perempuan Melacur

Motif mendasari perilaku manusia, motif memainkan peranan penting dalam memahami perilaku orang dan memahami mengapa orang menghabiskan waktu mereka untuk mengerjakan sesuatu. Jadi, motif juga mendasari pilihan perempuan untuk menjadi pelacur atau orang tua atau suami untuk menekan anak atau istri mereka menjadi pelacur. Menurut Koentjoro, dalam motif ekonomi yang menekankan uang, uang adalah faktor utama, namun uang bukan segalanya karena uang hanya mediasi untuk mencapai tujuan. Karena uang mempunyai banyak makna, uang hanya merepresentasikan aspirasi material.²¹

Koentjoro, menjelaskan ada proses interaksi antara tiga faktor utama yang dapat diasumsikan mempengaruhi perempuan menjadi pelacur, yaitu pertama, faktor permintaan sebagai faktor penarik, permintaan yang menarik seseorang kedalam pelacuran datang dari sektor turisme, mobilitas orang, dan perubahan sosial. Kedua, faktor persediaan sebagai faktor yang mendorong wanita kedalam pelacuran adalah sikap terhadap pernikahan, motif untuk berkuasa, budaya patrimonial {ekspresi dari hegemoni budaya pria atas wanita}. Ketiga, faktor perantara yang memfasilitasi semakin lajunya pertumbuhan pelacuran.²²

Sulistyarningsih menyimpulkan ada tiga faktor yang mendorong cepatnya laju pertumbuhan pelacuran di Indonesia, yakni {a} perubahan struktur sosial, {b} mobilitas sosial, dan {c} tingginya angka perceraian. Faktor perubahan struktur sosial dan mobilitas sosial adalah migrasi. Orang-orang miskin dari pedesaan bermigrasi ke kota untuk bekerja diluar sektor agraria. Nilai sosial para migran ini cenderung mengalami perubahan setelah mereka mengalami hidup dan bekerja di kota. Hal ini sering membawa konsekuensi berubahnya nilai-nilai sosial desa, nilai suka saling membantu {gotog royong}, solider {guyub} dan agamis, kemudian digeser dan digantikan oleh nilai-nilai individual.²³

²⁰Koentjoro, On the..., 46-47

²¹Ibid, hal 54

²²Ibid, hal 92

²³Sulistyarningsih and Jones, G.W. *Prostitution in Indonesia; Working Paper in Demography*(Canberra: The Australian National University, 1995), hal 96

Berbeda dengan diatas, Mansur Fakhri melihat ada beberapa faktor mengapa seseorang melacurkan diri atau terjun ke dunia prostitusi yaitu:

1. Latar belakang keluarga, mereka biasanya berasal dari keluarga yang tidak harmonis {broken home} dimana kedua orang tuanya bercerai, tinggal bersama ibu tiri atau ayah tiri, atau juga ditinggal selingkuh oleh ibu, ayah, atau suami.
2. Kondisi sosial ekonomi, sebagian besar orang yang melacurkan diri berasal dari sosial ekonomi yang sangat rendah, dengan kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan tidak memungkinkan untuk dapat hidup dengan gaya hura-hura seperti orang yang hidup berkecukupan.
3. Tingkat pendidikan, mereka rata-rata hanya pernah mengenyam pendidikan sampai tingkat SD dan tidak sempat menamatkan pendidikan pada tingkat SLTP dan SMU.
4. Pengalaman seksual dini, penelitian yang dilakukan terhadap prang anak yang dilacurkan menyebutkan bahwa anak telah mengalami pengalaman seksual di usia dini, yakni pada saat mereka di usia.... sampai.... tahun, baik yang dilakukan oleh ayah kandung, bapak asuh, paman, tetangga, teman maupun pacar.
5. Kekerasan yang pernah dialami, kekerasan kadang bukan sekedar dilakukan oleh orang lain namun juga dilakukan oleh pihak keluarga bahkan oleh orang tuanya sendiri.²⁴

Menurut Koentjoro, ada lima faktor yang difahami sebagai alasan yang menuntun perempuan untuk menjadi pelacur adalah:

1. Materialisme, aspirasi untuk mengumpulkan kekayaan merupakan sebuah orientasi dalam kehidupan menjadi tolok ukur suatu keberhasilan.
2. Modeling, karena tingginya aspirasi terhadap materi maka pelacur yang berhasil banyak mengumpulkan materi menjadi model atau contoh. Modeling adalah salah satu cara sosialisasi pelacuran yang mudah dilakukan dan efektif.
3. Dukungan orang tua, karena orang tua mempunyai aspirasi yang tinggi terhadap materi sementara di sisi lain mereka tidak memiliki kemampuan untuk memenuhinya, maka salah satu jalan adalah dengan mendukung atau memaksa anaknya menjadi pelacur.
4. Lingkungan yang permisif, pada kelompok masyarakat primer, pengawasan dan kontrol biasanya aktif sekali. Namun sebaliknya, jika kontrol masyarakat pasif maka pelacuran akan berkembang pada komunitas tersebut dan tingkat toleransinya akan semakin tinggi terhadap pelacuran.
5. Faktor ekonomis, ada beberapa faktor yang ditafsirkan sebagai alasan ekonomi, kemiskinan, pendapatan rendah, pendidikan rendah, tidak memiliki keterampilan dan pengangguran.²⁵

Menurut Marzuki Umar²⁶ ada beberapa penyebab mengapa wanita meneggelamkan diri ke lembah hitam pelacuran, yaitu:

1. Hubungan keluarga yang berantakan, terlalu menekan dan juga adanya penyiksaan seksual yang dialami dalam keluarga.

²⁴Mansur Fakhri, "Pengantar Tim Yayasan Kakak, dalam anak-anak yang Dilacurkan; Masa Depan yang Tercampakkan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hal 34-35

²⁵Koentjoro, *On the...*, hal 135-136

²⁶Marzuki Umar, *Prilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001), hal 73

2. Jauhnya seseorang dari kemungkinan hidup secara normal akibat rendahnya pendidikan yang dimiliki, kemiskinan, dan gambaran jaminan pekerjaan dan masa depan yang tidak jelas.
3. Hasrat berpetualangan dan kemudahan meraih uang juga mendorong ke arah pelacuran.
4. Hubungan seks terlalu dini, keterlibatan pada suatu pergaulan yang selalu merongrongnya, dan mungkin juga dikombinasikan oleh pengaruh obat dan alkohol.
5. Ada juga yang memandang perasaan benci terhadap ayah yang diletupkan dengan cara melacurkan diri dari satu pelukan laki-laki ke lelaki lain.
6. Paduan antara kemiskinan, kebodohan, dan kekerasan dan tekanan penguasa.
7. Tentunya keluarga yang menimbulkan anak bermasalah seperti merupakan keluarga yang gagal memfungsikan perannya sebagai pembina nilai-nilai keagamaan dan tidak memberikan nilai-nilai untuk menolak pelacuran.

E. SERUAN BAGI PELAKSANA DAKWAH: CATATAN KRITIS

Wanita yang melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya secara berganti-ganti pasangan diluar perkawinan yang sah dengan memperoleh imbalan berupa uang, materi atau jasa, itulah yang biasa kita sebut “pelacur” atau “wanita tuna susila”, dan atau “pekerja seks komersial” {setelah mengalami eufemisme /penghalusan makna}. Mereka {baca: para pelacur} juga merupakan obyek dakwah yang tidak boleh diabaikan. Pelacuran menjadi masalah tersendiri dengan berbagai macam faktor, motivasi, dan penyebab yang begitu kompleks sehingga mereka terjerumus dan menjerumuskan diri menjadi seorang pelacur. Masalah ini disadari hanya sebatas sebagai sebuah penyakit {patologi} masyarakat dengan stigmatisasi bahwa pelacur adalah orang atau hal yang kotor, maksiat, asusila, perusak rumah tangga, perusak keturunan, dan lain sebagainya.

Namun, harus diakui bahwa hingga kini belum ada sebuah pemikiran yang secara komprehensif – reflektif kontinyu memberikan penanganan serius pelacuran {pencegahan-pembinaan-penyembuhan} melalui pendekatan dakwah Islamiyah, baik dari kalangan intelek, praktisi dakwah, ormas, maupun yang lain {termasuk pemerintah}, bahkan kita hanya disibukkandan fokus pada persoalan umat yang lain dan mengabaikan masalah pelacuran. Padahal, perkembangan pelacuran semakin pesat dengan modus yang terus mengikuti perkembangan baik mode, style, maupun teknologi yang berkembang di masyarakat. Sementara pemahaman para praktisi tentang mengapa jadi pelacur dan bagaimana menanganinya, belum mempunyai konsep yang jelas. Lebih lanjut, dakwah Islamiyah yang akan diberikan dalam mendiagnosis mereka tidak sesederhana yang dibayangkan, seperti yang dilaksanakan selama ini. Ceramah di kompleks pelacuran atau di panti rehabilitasi, setelah itu, sang da'i pulang, maka materi ceramah masuk dari telinga kiri dan keluar melalui telinga kanan. Dapat diastikan, hasilnya tidak jelas. Semua menjadi sia-sia.

Kegiatan dakwah bukan hanya mencakup sisi ajakan (materi dakwah), tetapi juga sisi pelakunya {da'i} juga pesertanya {mad'u} yang juga mempunyai metode {atsar} beragam yang telah digariskan oleh Al-Qur'an dan dipraktikkan oleh Rasulullah SAW., yakni bi al hikmah, al-mau'idzoh hasanah, bi al-mujadalah billati hiya ahsan. Metode tersebut menekankan interaksi aktif berdasarkan

pemahaman yang komprehensif terhadap unsur-unsur dakwah tersebut diatas. Konsekuensinya, metode ini meniscayakan akan menjadi metode yang berbeda dengan metode yang lain, baik pada pilihan aktivitas {dakwah bi al lisan atau bi al haldan atau bi al kalam}, maupun kepada kemungkinan hasil yang diraih. Dan hal tersebut diatas tidak berlaku dan berhasil begitu saja, melainkan membutuhkan sebuah serangkaian perjuangan panjang yang tidak lepas dari apa yang disebut dengan *amaliyyah al-idariyyah*²⁷ {aktivitas manajerial} sebagai usaha mewujudkan tujuan-tujuan dakwah dengan mempergunakan tenaga dan memanfaatkan sumber-sumber yang ada.

1} Kembali kepada Makna dan Sifat Dasar Dakwah

Ajaran Islam adalah konsepsi yang sempurna dan komprehensif, yang meliputi segala aspek kehidupan manusia, baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi. Secara teologis, Islam merupakan sistem nilai dan ajaran yang bersifat Ilahiyah dan transenden. Sedangkan menurut aspek sosiologis, Islam merupakan fenomena peradaban, kultural, dan realitas sosial dalam kehidupan manusia. Dalam konteks tersebut, makna dakwah harus mampu melakukan pembebasan umat manusia secara fundamental, yaitu aktualisasi teologis {iman yang dimanifestasikan dalam sistem kegiatan dalam bidang sosial kemasyarakatan} agar dapat mempengaruhi cara merasa, berpikir, dan bertindak pada dataran kenyataan individual dan sosio-kultural dalam rangka mewujudkan ajaran Islam dalam semua segi kehidupan.

Esensi dari makna dakwah itu adalah sebuah proses dari aktivitas dan upaya untuk mengubah manusia baik secara individu maupun kelompok dari situasi yang tidak baik kepada situasi yang lebih baik. Dengan demikian, dakwah tidak hanya sebagai usaha peningkatan pemahaman keagamaan dan pandangan hidup saja, tetapi juga mencakup sasaran yang lebih luas, yaitu pelaksanaan ajaran Islam secara menyeluruh dalam berbagai segi kehidupan yang tidak terlepas dari lingkungan amar ma'ruf nahi munkar.²⁸

Hakikat dakwah²⁹ {yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai etis kebenaran, dan selalu bergerak dalam tataran rasional manusia}, yaitu bahwa dakwah merupakan sebuah kenyataan dari entitas melekat berikut, yaitu pertama, sebuah kebebasan, dimana dakwah harus dilakukan dengan serius dan diharapkan diterima dengan komitmen terhadap kebenaran. Obyek dakwah harus merasa bebas sama sekali dari ancaman, harus benar-benar yakin bahwa kebenaran itu hasil dari penilaian sendiri. Seseorang yang dengan suka rela atau dengan penuh kesadaran telah memilih suatu agama, maka yang bersangkutan telah berkewajiban untuk melaksanakan ajarannya secara sempurna. Betapa Allah memuliakan dan menghrgai kehendak manusia, pikirannya, dan perasaannya serta membiarkannya mengurus urusannya sendiri, dan menanggung segala perbuatannya.³⁰

²⁷Yunan Yusuf, "Dakwah Professional," dalam Munir&Wahyu Ilaihi, Manajemen Dakwah (Jakarta: Rahmat Semesta, 2006), xi.

²⁸Saifullah, *Dakwah Tekstual dan Kontekstual* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001) hal 5

²⁹Moh. Ali aziz, Ilmu dakwah (Jakarta: Prenada Media, 2004) hal 15-25

³⁰Husain Abdullah, *Metodologi Dakwah Dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Basritama, 1997), hal 150

Kedua,rasionalitas. Islam adalah agama yang berurusan dengan alam kemanusiaan. Seluruh pesannya disampaikan dengan cara yang amat mendalam dan cerdas tanpa ruang dan waktu, nash-nash yang terdapat dalam Al-Qur'an berbicara kepada hati dan akal manusia untuk memenuhi spiritual dan rasionalitas manusia. Rasionalitas dakwah mempunyai tiga batasan; dakwah menolak semua yang tidak berkaitan dengan realitas, dakwah menafikan hal-hal yang sangat bertentangan, dan dakwah terbuka dengan bukti baru atau melawan sikap literatisme, fanatisme, dan konservatisme yang dapat menimbulkan stagnasi umat.

Ketiga, universalisme. Ajaran Islam yang disampaikan mengandung ajaran-ajaran dasar yang berlaku untuk semua tempat dan semua zaman {tidak terkotak-kotak dalam ras, suku, dan bangsa}, absolut kebenarannya tidak berubah dan tidak boleh diubah.

Sementara itu dalam dialog internasional tentang Dakwah Islam dan Misi Kristen³¹ pada tahun 1976, Al-Marhum Ismail Al-Faruqi, seorang Profesor Universitas Temple Philedhelfia USA, merumuskan enam sifat-sifat dasar dakwah Islam secara umum, yakni: bahwa dakwah Islam bersifat persuasif bukan koersif, artiya dakwah berusaha mempengaruhi manusia untuk menjalankan agama sesuai dengan kesadaran dan kemauan sendiri, bukan berdasarkan pemaksaan karena pemaksaan adalah perampasan hak azasi manusia dalam beragama. Dakwah ditujukan kepada pemeluk Islam dan non Islam, dakwah berusaha menyebarkan rahmat Alloh SWT. Kepada seluruh penghuni alam raya semesta. Bagi yang sudah memeluk Islam, dakwah ditujukan untuk meningkatkan kualitas imannya, dan bagi non Islam ditujukan untuk menerima Islam sebagai agama kebenaran.

Dakwah adalah anamesis artinya berupaya mengembalikan fitrah manusia, dimana fitrah manusia sejak dilahirkan dan secara kodrati menerima kebenaran Islam, karena Islam adalah dinul fitrah, yaitu agama yang sesuai dengan hukum alam yang ada dalam diri manusia. Dakwah bukan pembawa psikoterapik, dakwah bukan pekerjaan magis, mistis, hipnotis, atau usaha-usaha kesenangan atau dalam bentuk psikoterapik. Dakwah Islam tidak dilakukan dengan psikoterapik karena mengalihkan agama seseorang yang sadar dengan cara-cara magis, mistis, atau kimiawi untuk memeluk Islam adalah amoral dan termasuk kejahatan. Dakwah adalah rational intellection, artinya dakwah adalah suatu proses kritis dari rasional intelektual yang sifatnya tidak pernah dogmatis, proses intelektualisasi tidak pernah berhenti. Iman senantiasa bersifat dinamis dan intensitasnya semakin tumbuh dan berkembang.

Dakwah adalah rationally necessary, maksudnya menyampaikan pesan atau materi dakwah secara rasional, bukan sebuah proklamasi dari sebuah peristiwa dan kebenaran ide tetapi suatu presentasi atau penyajian penilaian kritis bagi nilai-nilai kebenaran, sebuah proposisi dan fakta tentang metafisik dan etik serta relevansinya bagi manusia. Dakwah Islam tidak akan pernah memaksa, namun memberi kesempatan untuk memilih sendiri setelah mereka diseru menuju jalan kebenaran.³²

³¹Khursyid Ahmad, Dakwah Islam dan Misi Kristen (Bandung: Risalah, 1984), hal 35

³²Aziz, Ilmu..., hal 47-53

2} Manajemen dan Fungsi Dakwah

Dakwah Islamiyah harus dapat menampilkan citra Islam yang positif sebagai icon “rahmat bagi alam semesta”, bukan saja pada aspek pandangan hidup bagi umat Islam namun juga untuk umat lainnya sebagai keuniversalnya. Dengan demikian, dakwah harus mampu dijadikan sebagai sarana pemecahan permasalahan umat karena dakwah merupakan sarana penyampaian informasi ajaran Islam yang didalamnya mengandung fungsi edukasi, kritik, dan kontrol sosial. Untuk mencapai tujuan ini, secara maksimal, maka disinilah letak signifikasinya manajemen³³ dakwah untuk mengatur dan mengantarkan dakwah tepat sasaran dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Dalam manajemen dakwah, hasil yang difokuskan adalah sasaran dakwah yang menjadi target bagi aktivitas dakwah yang direalisasikan dalam bentuk yang konkrit. Oleh karena itu, dibutuhkan tindakan kolektif dalam bentuk kerjasama sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki oleh para pelaku dakwah, sehingga masing-masing mampu memberikan kontribusi yang maksimal secara profesional. Kapasitas peranan manajemen dakwah dalam hal ini adalah melakukan kerjasama secara harmonis yang merupakan sebuah usaha kolektif, terwujud dalam sebuah organisasi yang masing-masing memiliki fungsi dan tugas sesuai dengan bidangnya yang diatur menurut prinsip-prinsip manajemen. Dan bila kondisi tersebut berjalan, maka tujuan dari organisasi dakwah akan mencapai sasaran seperti yang telah ditetapkan.³⁴

Perencanaan sebagai salah satu fungsi manajemen, merupakan starting point dari aktivitas manajerial. Karena bagaimanapun sepenuhnya suatu aktivitas manajemen, tetap membutuhkan perencanaan, karena perencanaan merupakan langkah awal dari sebuah kegiatan untuk memperoleh hasil yang maksimal. Secara umum tugas dari perencanaan yang paling utama adalah menentukan sasaran yang ingin dicapai, yang kemudian diklasifikasikan menjadi sasaran temporal dan sektoral serta menentukan skala prioritas pelaksanaannya untuk dapat menjamin secara maksimal tidak adanya sebuah pengabaian tugas tertentu atau hal-hal lain yang tidak kalah pentingnya. Dengan demikian, pencapaian secara maksimal dari fungsi dakwah berikut ini dapat tercapai, yaitu pertama, dakwah berfungsi untuk menyebarkan Islam kepada umat manusia baik secara individu maupun kelompok sehingga mereka merasakan Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin. Kedua, dakwah berfungsi melestarikan nilai-nilai Islam dari generasi ke generasi, sehingga kelangsungan ajaran Islam tidak terputus. Ketiga, dakwah berfungsi korektif artinya meluruskan akhlak yang bengkok, mencegah kemungkaran, dan mengeluarkan manusia dari kegelapan rohani.³⁵

3) Kesiapan dari Para Da’i

Dalam kegiatan dakwah, peranan da’i sangatlah esensial. Sebab tanpa da’i, ajaran Islam hanyalah ideologi yang tidak terwujud dalam kehidupan masyarakat.

³³Munir & Wahyu, Manajemen Dakwah (Jakarta: Rohmat Semesta 2006), hal 11

³⁴Munir dan Ilaihi, Manajemen..., hal 69

³⁵Aziz, Ilmu..., hal 59

Biar bagaimanapun baiknya ideologi Islam yang harus disebar di masyarakat, ia akan tetap sebagai ide, ia akan tetap sebagai cita-cita yang tidak terwujud jika tidak ada manusia (da'i) yang menyebarkannya.³⁶ Melaksanakan dakwah dengan berbagai komponennya adalah ikhtiar manusia untuk menjadikan setiap individu atau kelompok taat sepenuhnya mengamalkan ajaran Islam. Oleh sebab itu, dakwah harus dilakukan dengan persiapan yang matang, dengan terlebih dahulu melakukan analisis yang mendalam terhadap unsur-unsur dakwah sebagai komponen sistemnya, dengan harapan dakwah dapat dilaksanakan dengan pendekatan dan metode yang tepat,³⁷ maka tujuan yang telah ditetapkan juga akan tercapai. Akan tetapi, perubahan kejiwaan manusia tidak selalu memiliki kelaziman demikian, karena ada faktor-faktor lain yang ikut berperan dalam proses perubahan jiwa keagamaan seseorang,

Para da'i atau pekerja dakwah harus memahami atau menyadari dalam proses dakwah mengubah input menjadi output yaitu perubahan tingkah laku keagamaan menjadi lebih baik, ada faktor luar yang ikut berperan yaitu "faktor X" (faktor hidayah)³⁸ yang berupa petunjuk khusus dari Allah SWT. Kepada seseorang yang dikehendaki untuk memeluk Islam atau untuk mengubah dan meningkatkan tingkah laku keagamaan yang lebih positif. Syaikh Ahmad Mustofa Al-Maraghi menjelaskan bahwa dengan hidayah ilham (insting), hidayah hawasyi (panca indera), dan hidayah akal saja, manusia tidak akan mampu menemukan kebenaran yang mutlak, sehingga Allah SWT menurunkan Rasul untuk memberi hidayah adyan (agama) sebagai sumber kebenaran yang absolut. Akan tetapi pengetahuan manusia yang bersumber dari keempat hidayah diatas menjamin mereka dapat menerima kebenaran dan mengamalkan agama, karena menerima dan mengamalkan agama membutuhkan dorongan halus dari lubuk hati yang paling dalam. Dorongan yang demikian inilah yang disebut sebagai hidayah taufik yang menjadi hak mutlak Allah SWT.

Dari berbagai macam hidayah diatas, terlihat pula adanya keterbatasan hak dan kemampuan para da'i untuk mengubah sikap dan tingkah laku keagamaan mitra (obyek) dakwahnya. Tugas da'i hanyalah menyampaikan ajaran Islam sedangkan petunjuk untuk masuk Islam hanya datang dari Allah SWT. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam QS. 1:20.

Ayat tersebut diatas, dimaksudkan untuk mengobati keputusan para da'i yang melihat kenyataan hasil dakwahnya masih jauh dari apa yang diinginkannya. Tetapi, ayat tersebut tidak boleh dijadikan dasar berapologi untuk membela diri dalam kegagalan melaksanakan suatu proses dakwah. Akan tetapi, kegagalan merupakan sebuah proses untuk dapat dijadikan sebagai momen untuk melakukan self control, dan introspeksi sebagai bagian dari evaluasi dakwahnya.³⁹

³⁶Hamzah Ya'qub, *Publistik Islam* (Bandung: Diponegoro, 1981), hal 37

³⁷Aziz, *Ilmu...*, hal231

³⁸Aziz, *Ilmu...*, hal 223

³⁹Aziz, *Ilmu...*, hal 233

F. PENUTUP

Kehadiran dakwah yang bermakna harus mampu melakukan pembebasan umat manusia secara fundamental, yaitu aktualisasi teologis (iman yang dimanifestasikan dalam sistem kegiatan dalam bidang sosial kemasyarakatan) agar dapat mempengaruhi cara merasa, berpikir, dan bertindak pada dataran kenyataan individual dan sosio-kultural dalam rangka mewujudkan ajaran Islam dalam semua segi kehidupan. Dengan demikian, dakwah tidak hanya usaha peningkatan pemahaman keagamaan dan pandangan hidup saja, tetapi juga mencakup sasaran yang lebih luas, yaitu pelaksanaan ajaran Islam secara menyeluruh dalam berbagai segi kehidupan yang tidak terlepas dari lingkungan amar ma'ruf nahi munkar.

Oleh sebab itu, dakwah harus dilakukan dengan persiapan yang matang, dengan terlebih dahulu melakukan analisis yang mendalam terhadap unsur-unsur dakwah sebagai komponen sistemnya, dengan harapan dakwah dapat dilaksanakan dengan pendekatan dan metode yang tepat. Demikian juga ketika para pegiat dakwah harus menyentuh sasaran dakwah dari kalangan pelacur, dibutuhkan ketrampilan dan kesabaran ekstra untuk mendekatinya. Untuk jenis sasaran ini, dakwah yang tepat harus tidak cukup dengan *bi al-lisan* tetapi juga mesti memberikan penyelesaian tuntas atas berbagai faktor penyebab seorang perempuan melacur. Dengan demikian dakwah *bi al-hal* merupakan strategi yang harus dipilih untuk meretas problema pelacuran.

Namun, pada akhirnya harus disadari dan dipahami bahwa adanya keterbatasan hak dan kemampuan para da'i untuk mengubah sikap dan tingkah laku keagamaan mitra (obyek) dakwahnya. Tugas da'i hanyalah menyampaikan ajaran Islam sedangkan petunjuk untuk menerima, masuk Islam dan melaksanakan ajaran Islam secara kaffah, hanya datang dari Allah SWT. Demikianlah kenyataannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Al Ghifari, *Gelombang Kejahatan Seks Remaja Moderen* (Bandung: Mujahid Press, 2004)
- Amrulloh Ahmad, *Dakwah Islam dan Perubahan Sosial* (Yogyakarta: Prima Duta, 1983)
- Anggraini, *Pelaksanaan Bimbingan Bagi Para Wanita Tuna Susila* (Mataram: Departemen Sosial Kantor Wilayah NTB, 1995)
- Bagong Suyanto & Sri Sanituti H (Editor), *Anak Perempuan Korban Kekerasan Seksual* (Surabaya: Lutfansyah Mediatama, 2003)
- Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Susila, *Standar Pelayanan Minimal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Susila* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial RI, 2005)
- George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda saduran Alimandan* (Jakarta: Rajawali Pers, 1985)
- Hamzah Ya'qub, *Publistik Islam* (Bandung: Diponegoro, 1981)
- Husain Abdullah, *Metodologi Dakwah Dalam Al Qur'an* (Jakarta: Lentera Basritama, 1997)
- Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *Bahaya Zina, Buku Pintar Agama Islam* (Jakarta: Pustaka Petronomika, 2004)
- Ida Cyntia, *Sex After Lunch: Penyalahgunaan Anugerah* (Jakarta: Pustaka Mina, 2004)

- Irwan Yulianto (editor Yayasan Kakak Tim), *Anak-anak Yang Dilacurkan Masa Depan Yang Tercampakkan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002)
- Ismail Thoyib dan Rabiatul Adawiyah, *Laporan Penelitian (Tidak Dipublikasi), Pendidikan Islam dan Pembinaan Wanita di NTB; Studi Kasus di PSKW Budi Rini Mataram*, 2004
- Kartini Kartono, *Pathologi Sosial* (Jakarta: Raja Wali Pers, 1981)
- Kartono, *Patologi Sosial*, 2009, Jakarta: Rajawali
- Khursyid Ahmad, *Dakwah Islam dan Misi Kristen*(Bandung: Risalah, 1984)
- Koentjoro, *On The Spot, Tutur Dari Sarang Pelacur* (Yogyakarta: Tinta, 2004)
- Koentjoro, *Pelacur dan Resosialisasi Antara Patologi dan Rehabilitasi Sosial*, <https://doi.org/10.23917/indigenous.v0i0.4600>. Diakses tanggal 5 Januari 2019
- Kuntjoro Jakti, *Globalisasi Ekonomi Dunia dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Infrastruktur di Indonesia (Makalah Seminar, dipresentasikan di PT. Bukaka Meeting, Kamis 7 Maret 1996)*
- Marzuki Umar Sa'abah, *Prilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*(Yogyakarta: UII Press, 2001)
- Moh. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah* (Jakarta: Prenada Media, 2004)
- Munir & Wahyu Ilahi, *Manajemen Dakwah* (Jakarta: Rahmat Semesta, 2006)
- Najad Hafidz, *Nasehat Untuk Para Wanita* (Jakarta: Gema Insani Press, 1990)
- Nurhilaliati, "*Seksualitas dan Pencadangan Wanita*", dalam Tasamuh, *Jurnal Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Islam*, (Fakultas Dakwah IAIN Mataram, Volume 2, Nomer 2, Juni 2005)
- Nurviyati, *Skripsi Strategi Dakwah tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menanggulangi dampak prostitusi (Studi Kasus di Dukuh Selempong Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti kabupaten Pati)*, 2015, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang
- Paul B. Horton dan CL. Hunt, *Sosiologi Jilid I&II* (Jakarta: Erlangga, 1996)
- Saifullah, *Dakwah Tekstual dan Kontekstual* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001)
- Sulistiyarningsih dan Jones, G.W. *Prostitution in Indonesia; Working Paper in Demography*, (Canberra: The Australian National University, 1995)
- Sulistyaningsih, Endang & Yudo Swasono, 1993, *The Sex Industry, Prostitution and Development in Indonesia*, Laporan penelitian untuk Universitas Mahidol, Bangkok
- Sunarto AS, *Kyai dan Prostitusi Pendekatan Dakwah KH. Muhammad Khoiron Syuaeb di Lokalisasi Kota Surabaya*, *Jurnal Komunikasi Islam*, Volume 03, Nomor 2, Desember 2013
- Sutarto Hadi&Bambang Wicaksono, Triantoro, 2001, *Pembinaan Wanita Pekerja Seks Komersial Pasca Penutupan Lokalisasi*, PPPK UGM, Yogyakarta.
- Thanh-Dam Troung, *Seks Uang dan Kekuasaan, Pariwisata dan Pelacuran di Asia Tenggara* (Jakarta: LP3ES, 1992)
- Yusuf Madan, *Sex Education For Children: Panduan Islam Bagi Orang Tua dalam Pendidikan Seks untuk Anak* (Bandung: Kelompok Mizan, 2004)